

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desentralisasi yang diwujudkan dalam bentuk otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengelola potensi dan keanekaragaman daerah secara efektif dan efisien. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menetapkan Pemberdayaan Gotong Royong sebagai program unggulan daerah melalui Peraturan Daerah No 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) di Kabupaten Sumbawa Barat. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, Bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat Ikhlas, Jujur dan Sungguh-sungguh (IJS) dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja secara efektif dan efisien untuk percepatan pengentasan kemiskinan.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha

kesejahteraan sosial, maupun Lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial (UU No. 11 Tahun 2009).

Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 ialah sebagai dasar untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui peranan dan keberpihakan negara dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Tujuan Pembangunan Nasional serta Pasal 33 UUD 1945 tersebut akan berhasil apabila pemerintah dan masyarakat saling bersinergi dalam proses pembangunan termasuk di bidang kesejahteraan sosial. Akan tetapi pada zaman sekarang ini sebagian masyarakat dalam lingkaran kemiskinan, maka perlu kebijakan dan program untuk menunjang masyarakat agar sejahtera dari segi sosialnya. Meninjau dari kebijakan dan program masa lalu cenderung dilaksanakan secara kurang efektif yang dimana jangkauan pelayanan terbatas, lebih mengedepankan pendekatan institusi/panti sosial dan dilaksanakan tanpa rencana strategi nasional.

Pemberdayaan masyarakat melalui program pada era globalisasi ini tentunya memberikan tantangan yang besar kepada pemerintah, dimulai dengan melihatnya kondisi ketidakstabilan ekologi, ekonomi, politik, sosial dan kultural yang tampak sangat nyata, adanya degradasi lingkungan, eksploitasi ekonomi dan politik. Dengan tantangan ini tentunya akan memacu pemerintah untuk membuat suatu kebijakan atau program yang dapat tepat sasaran, sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang terjadi pada

masyarakat. Sehingga tidak heran jika pemberdayaan ini tidak dapat di capai dalam waktu sekejap, melainkan melalui sebuah proses yang tidak singkat (Suharto, 2018:14).

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus pengentasan kemiskinan. Program yang dilaksanakan dalam pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat selama ini belum mampu memberikan dampak yang besar, sehingga sampai saat ini tujuan dari pembangunan nasional terkait dengan masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi masalah yang besar (Dedi, 2014:29).

Melihat berbagai permasalahan yang ada, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat pada tahun 2016 membentuk suatu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong. Sebuah harapan dihadirkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengentaskan kemiskinan. Peraturan Daerah yang lahir karena berbagai permasalahan yang terjadi serta semakin mudarnya budaya gotong royong dalam kehidupan masyarakat yang akan memberikan implikasi negatif karena tidak adanya rasa kebersamaan dan partisipasi antar masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah memandang perlu adanya menetapkan perda tentang pemberdayaan gotong royong yang didalamnya mengatur mengenai revitalisasi gotong royong yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan PDPGR yang diimplementasikan di seluruh desa/kecamatan yang tersebar di Sumbawa Barat ([sumbawabaratkab.go.id](http://sumbawabaratkab.go.id) diakses tanggal 15 November 2020 jam 09:15 WITA).

Program PDPGR di Kabupaten Sumbawa Barat ini terdiri dari beberapa jenis kegiatan. Salah satu kegiatan dari Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini adalah kegiatan jambanisasi se-Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan data yang telah dihimpun agen pemberdayaan gotong royong sebanyak 7.027 rumah yang berhak untuk menerima bantuan pembuatan jamban se-Kabupaten Sumbawa Barat. Namun setelah dilakukannya verifikasi oleh tim penggerak gotong royong tingkat kecamatan, maka pada tahun 2016-2017 jumlah rumah yang mendapat bantuan jambanisasi ini sebanyak 6.164 unit disemua desa yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat. Sementara 863 rumah yang sebelumnya didata setelah diverifikasi ternyata tidak memenuhi kriteria dari sasaran program ini. Menurut asisten II Setda Kabupaten Sumbawa Barat, bahwa biaya pembuatan jamban tersebut sebesar Rp. 1,5 juta, sedangkan khusus untuk pembuatan jamban yang ada di daerah terpencil ditambah biaya transportasi menjadi Rp. 2,5 juta seperti Desa Mantar, Mataiyang, Rarak Ronges, dan Talonang ([sumbawabaratkab.go.id](http://sumbawabaratkab.go.id) diakses tanggal 16 November 2020 jam 10:11 WITA).

Selain jambanisasi ada pula jenis kegiatan PDPGR yang lainnya yaitu Rehab dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni. Sebanyak 4.017 unit rumah tidak layak huni di Kabupaten Sumbawa Barat sudah tersentuh program penuntasan rumah tidak layak huni yang dilaksanakan dalam tiga tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati HW Musyafirin – Fud Syaifuddin. Persoalan rumah tidak layak huni ini, tidaklah mudah, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Karena itu, Pemda juga mengalokasikan lewat APBD, juga dikerjakan lewat alokasi anggaran DAK dan diusulkan lewat program di sejumlah kementerian. Tahun 2019 DAK dialokasikan sebanyak 125 unit, terdiri dari

70 unit bangun baru dan 55 unit peningkatan kualitas (rehab) dengan alokasi anggaran Rp 3 Milyar lebih (kabarntb.com diakses tanggal 1 Desember 2020 jam 21:00 WITA).

Berkaitan dengan pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong, ini dari 57 desa yang ada di Sumbawa Barat, sudah semua desa melaksanakan program ini mulai dari desa pelosok sampai desa yang dekat dengan kabupaten. Misalnya desa Seloto, yang merupakan desa yang berada diwilayah Kecamatan Taliwang kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri atas 15 RT. Di Desa Seloto ini program PDPGR sudah dikatakan berjalan dan sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Desa Seloto yang menjadi sasaran dari Program PDPGR ini. Ketertarikan peneliti menentukan wilayah penelitian dengan lokasinya di Desa Seloto, karena Desa Seloto merupakan salah satu desa jumlah jamban yang sedikit serta jumlah rumah tidak layak huni yang banyak yang ada di Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam program ini yaitu adanya program jambanisasi. Hal ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban di masing-masing rumahnya. Seperti halnya di Desa Seloto, bahwa tidak sedikit masyarakat yang tidak memiliki jamban dan hanya bisa menumpang di tetangga atau bahkan masih ada yang memanfaatkan sungai sebagai alternatif jambannya dan sudah berlangsung sangat lama., dan tentunya hal ini membuat masyarakat di Desa Seloto hidup secara tidak sehat. Padahal Kesehatan merupakan hak fundamental setiap individu, keluarga, dan masyarakat luas. Negara bertanggungjawab agar terpenuhi hak hidup sehat bagi warga negaranya untuk semua lapisan (dalam Ketetapan Konstitusi WHO dan UUD 45 pasal 28 dan UU no.32/1992).

Sehingga perlu di kaji lebih dalam bagaimana pola pemilihan dari kelompok sasaran dalam PDPGR ini serta kriteria yang jelas sebagai persyaratan penerimaan bantuan dari PDPGR ini sehingga dengan demikian tidak akan menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakat serta ketidakpercayaan masyarakat kepada agen PDPGR dan program ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mampu mengatasi masalah kemiskinan yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ([sumbawabarat.go.id](http://sumbawabarat.go.id) diakses tanggal 17 November 2020 jam 12:21WITA).

Berangkat dari pemikiran di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Keberlangsungan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Sumbawa Barat ( Studi Kasus Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Efektivitas Keberlangsungan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang ?
2. Apa saja Faktor yang mempengaruhi Efektivitas Keberlangsungan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Efektivitas Keberlangsungan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang.
2. Untuk mengetahui Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Keberlangsungan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini nantinya bisa diharapkan dapat di gunakan untuk beberapa kepentingan, Yaitu :

#### **1.4.1 Manfaat Akademik**

Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.

### **1.4.3 Manfaat Teoritis**

- a. Sebagai sumber data atau informasi bagi peneliti berikutnya yang tertarik dengan penelitian Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan/perkembangan daerah khususnya Kabupaten Sumbawa Barat.
- c. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam megkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis mengangkat sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Bagian ini memuat uraian secara sistematis tentang hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang dikaji dalam penelitian. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

*Pertama*, Penelitian yang dilakukan oleh Susiana dengan judul penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Terhadap Pengetasan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2017). Hasil Penelitian Secara umum implementasi PDPGR di desa Kelanir mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat melalui kegiatan PDPGR dari tahun 2016-2017, namun dalam pelaksanaanya di pengaruhi oleh banyak faktor seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. PDPGR di desa Kelaner tidak berjalan optimal di karenakan tidak ada sosialisasi progam kepada masyarakat, rendahnya kualitas agen pemberdayaan PDPGR desa Kelaner sebagai ujung tombak keberhasilan program serta tidak adanya SOP sejak tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan program.

*Kedua*, Penelitian yang dilakukan oleh Mario Del Rosario dengan judul penelitian Pelaksanaan Fungsi Agen Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 Studi Kasus Di Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Hasil penelitian secara umum penerapan PERDA NO.3 Tahun 2016 terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kelurahan Telaga Bertong sudah berjalan sesuai dengan tujuan program yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan serta mengurangi angka kemiskinan meskipun belum mampu mengentaskan kemiskinan dalam skala besar. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tidak berjalan maksimal pada setiap kegiatan PDPGR di Kelurahan Telaga Bertong, hal ini dibuktikan dengan rendahnya kearifan masyarakat yang melibatkan diri dalam kegiatan gotong royong.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Elsa Elya Safitri dengan judul Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Studi Di Kabupaten Sumbawa Barat). Hasil penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong telah terlaksana namun masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun dari berbagai informan mengatakan bahwa pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini sudah baik, akan tetapi belum mampu mengajak masyarakatnya menjadi puas akan program tersebut, dimana masih banyak masyarakat yang mengeluh karena masih kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan dari program tersebut.

*Keempat*, Penelitian yang dilakukan oleh Nunung Unayah dengan judul Gotong Royong Sebagai Modal Sosial Dalam Penanganan Kemiskinan (*Mutual Help Activities As Social Capital In The Handling Of Poverty*). Hasil penelitian secara umum Nilai gotong royong masih terlembaga dengan kuat di masyarakat Enrekang. Keluarga miskin yang menerima program RUTILAHU ketika merahab rumahnya memperoleh dukungan dan bantuan dari warga di sekitarnya dalam bentuk tenaga, bahan bangunan, dan bahan makanan. Dukungan dan bantuan dari warga di sekitar tersebut akan sangat membantu dan meringankan beban, mengingat bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp. 10 juta. Keterlibatan warga tersebut merupakan bentuk partisipasi sosial masyarakat. Berdasarkan pengalaman program RUTILAHU Enrekang, maka sebaiknya program-program yang diluncurkan pemerintah didesain dengan konsep partisipasi sosial masyarakat. Karena program yang melibatkan masyarakat, akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat akan ikut bertanggung jawab.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rafifudin Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (2016) dengan judul Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. Hasil penelitian : implementasi PKH di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak ternyata banyak mengalami kendala dan belum diimplementasikan dengan baik. Selain itu sosialisasinya belum menyeluruh, sehingga kurang mendapat dukungan dari pihak terkait.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Metode Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Relevansi</b>	<b>Critical Point</b>
1	Susiana (2018)	Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Terhadap Pengetasan Kemiskinan (Studi Kasus Di Desa Kelanir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2017)	Metode Deskriptif Kualitatif	Secara umum implementasi PDPGR di desa Kelanir mampu meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat setempat melalui kegiatan PDPGR dari tahun 2016-2017, namun dalam pelaksanaannya di pengaruhi oleh banyak faktor seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. PDPGR di desa Kelanir tidak berjalan optimal di karenakan tidak ada sosialisasi progam kepada masyarakat, rendahnya kualitas agen pemberdayaan PDPGR desa Kelanir sebagai ujung tombak keberhasilan program serta tidak adanya	Kesamaannya dengan yang dikaji peneliti saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif. Namun perbedaanya adalah hanya lokasi penelitian serta teori yang digunakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sejauh ini penelitian yang dilakukan oleh Susiana (2018) telah dilakukan dengan baik, yang diperkuat dengan berbagai data-data yang dapat menunjang penelitian tersebut.</li> </ul>

				SOP sejak tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan program.		
2	Mario Del Rosario (2018)	Pelaksanaan Fungsi Agen dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui program daerah pemberdayaan gotong royong (PDPGR) Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 (Studi Di Kelurahan Bertong)	Metode Kualitatif	Hasil penelitian secara umum penerapan PERDA NO.3 Tahun 2016 terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kelurahan Telaga Bertong sudah berjalan sesuai dengan tujuan program yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan serta mengurangi angka kemiskinan meskipun belum mampu mengentaskan kemiskinan dalam skala besar. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tidak berjalan maksimal pada setiap kegiatan PDPGR di Kelurahan Telaga Bertong, hal ini dibuktikan dengan rendahnya kearifan masyarakat yang melibatkan	Kesamaannya dengan yang dikaji peneliti saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Namun perbedaanya adalah hanya lokasi penelitian serta teori yang digunakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mario Del Rosario (2018) ini, tingkat partisipasi masyarakat seharusnya lebih dijelaskan secara rinci dan lebih mendalam lagi.</li> </ul>

				diri dalam kegiatan gotong royong.		
3	Elsa Elya Safitri (2018)	Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Di Kabupaten Sumbawa Barat	Metode Penelitian Empiris (Kualitatif)	Hasil penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong telah terlaksana namun masih belum sepenuhnya optimal. Meskipun dari berbagai informan mengatakan bahwa pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini sudah baik, akan tetapi belum mampu mengajak masyarakatnya menjadi puas akan program tersebut, dimana masih banyak masyarakat yang mengeluh karena masih kurangnya perhatian dari pemerintah daerah terhadap masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan dari program tersebut.	Penelitian yang di kaji oleh penulis dengan penelitian yang terkait sama-sama mengkaji tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong. Namun yang menjadi perbedaannya yaitu terletak di teori yang digunakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kurangnya data-data/daftar tabel sebagai alat untuk memperkuat penulisan dalam penelitian ini. Studi kasus di Kabupaten Sumbawa Barat, namun hanya 3 (tiga) kecamatan saja yang diteliti dari 8 (delapan) kecamatan yang ada di kabupaten tersebut.</li> </ul>

4	Nunung Unayah (2017)	Gotong Royong Sebagai Modal Sosial Dalam Penanganan Kemiskinan	Metode Kualitatif	<p>Hasil penelitian secara umum Nilai gotong royong masih terlembaga dengan kuat di masyarakat Enrekang. Keluarga miskin yang menerima program RUTILAHU ketika merahab rumahnya memperoleh dukungan dan batuan dari warga di sekitarnya dalam bentuk tenaga, bahan bangunan, dan bahan makanan. Dukungan dan bantuan dari warga di sekitar tersebut akan sangat membantu dan meringankan beban, mengingat bantuan dari pemerintah hanya sebesar Rp. 10 juta. Keterlibatan warga tersebut merupakan bentuk partisipasi sosial masyarakat. Berdasarkan pengalaman program RUTILAHU Enrekang, maka sebaiknya program-program yang diluncurkan pemerintah</p>	<p>Penelitian yang dikaji oleh peneliti memiliki kesamaan dengan penelitian yang dikaji oleh penulis dimana dalam hal ini sama-sama membahas tentang pemberdayaan gotong royong dalam menekan angka kemiskinan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam penulisan jurnal ini tidak dicantumkan kajian teori atau telaah teorinya untuk menggambarkan konsep dan teori maupun hasil penelitian yang relevan dengan fokus penelitian.</li> </ul>
---	----------------------	----------------------------------------------------------------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				didesain dengan konsep partisipasi sosial masyarakat. Karena program yang melibatkan masyarakat, akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan masyarakat akan ikut bertanggung jawab.		
5	Muhammad Rafifudin (2016)	Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Wanasalam	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukan implementasi PKH di Kecamatan Wanasalam banyak mengalami kendala dan belum diimplementasikan dengan baik. Sosialisasinya belum menyeluruh, sehingga kurang mendapat dukungan dari pihak terkait.	Kesamaannya dengan yang dikaji peneliti saat ini adalah sama-sama mengkaji tentang implementasi program untuk pemberdayaan masyarakat dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif, yang menjadi perbedaannya yaitu terletak pada teori yang digunakan serta lokasi penelitiannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indikator keberhasilannya tidak jelas dan tidak berpatokan pada teori.</li> <li>• Selain itu tidak adanya kesimpulan secara umum mengenai keberhasilannya dari program PKH di Kecamatan Wanasalam</li> <li>• Tidak adanya solusi yang ditawarkan terkait permasalahan yang ada dalam implementasi PKH.</li> </ul>



## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Definisi Efektivitas**

Istilah efektivitas merupakan kata yang tidak asing yang sering muncul dalam kajian ilmu Administrasi Negara. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Ada banyak pengertian dari kata efektivitas, banyak pendapat para ahli yang mengatakan bahwa sebuah efektivitas adalah pencapaian tujuan yang ingin segera dicapai, agar tujuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan ataukah justru tidak berjalan sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan. Berikut adalah pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian dari efektivitas: Kurniawan dalam Rosalina (2012:3) Transformasi Pelayanan Publik menyatakan “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan jumlah barang atau jasa yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program.

Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan (Amelia, 2015:9).

Menurut pendapat Mahmudi dalam Dean (2012:11) “*Manajemen Kinerja Sektor Publik*” mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, atau kegiatan”. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu kegiatan.

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Sehubungan dengan hal di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses output yang mengacu pada hasil guna dari suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai targetnya (Dean, 2012:11).

Kamus Ilmiah Populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu mengarah kepada pencapaian unjuk kerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. (Pabundu, 2008:129) memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Maksudnya adalah efektivitas merupakan suatu

standar pengukuran untuk menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas umumnya dipandang sebagai tingkat pencapaian tujuan operatif dan operasional. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai yang ditetapkan. Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan apabila sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lain (Farida, 2017:43).

Menurut Steers dalam Sutrisno (2010 : 133), mengemukakan pendapat bahwa hal terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan, yaitu :

a. Optimalisasi tujuan.

Dengan rancangan optimalisasi tujuan-tujuan memungkinkan dikenalnya bermacam-macam tujuan, meskipun tampaknya saling bertentangan. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan-tujuan yang layak dicapai yang satu sama lain berkaitan.

b. Perspektif sistem

Menggunakan sistem terbuka maka perhatian lebih diarahkan pada persoalan-persoalan mengenai saling hubungan, struktur, dan saling letergantungan satu sama lain. Dalam sistem ini mencakup 3 komponen utama yaitu *input*, *output*, dan proses. Sebagai sistem, suatu organisasi menerima *input* dari lingkungannya kemudian memprosesnya, dan kemudian memberikan *output* pada lingkungannya. Tanpa adanya *input* dari lingkungannya kemudian memprosesnya, dan kemudian memberikan *output* pada lingkungannya. Tanpa adanya *input* dari lingkungannya maka tidak akan ada *output* kepada lingkungannya dan otomatis maka suatu organisasi akan mati.

c. Tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Perilaku manusia dalam organisasi digunakan karena atas dasar realitanya bahwa tiap-tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan perilaku manusia sebagai alatnya. Karena factor manusia itulah suatu organisasi dapat efektivitas atau biasa menjadi tidak efektif.

#### **2.2.1.1 Ukuran Efektivitas**

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil yang telah diwujudkan. Namun jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh Siagian dalam Mustafa (2015:29), yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam melaksanakan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi;
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional;
4. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan;
5. Penyusunan program yang tepat, suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja;
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi;
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya;

8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Menurut Prihartono (2012 : 37), efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan terbaik antara input dan output, atau sering disebut ratio input dan output. Ada beberapa pendekatan untuk mengukur efektivitas, yaitu :

a. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*)

Organisasi dapat memperoleh berbagai macam sumber yang dibutuhkan dan memelihara system organisasi dalam kondisi mampu dan sumber daya yang diperoleh dari lingkungan.

b. Pendekatan Proses (*Process Approach*)

Hal ini merupakan efektivitas organisasi sebagai efisiensi dan kondisi dari organisasi secara internal.

c. Pendekatan Sasaran (*Goal Approach*)

Pengukuran sasaran menjadi sukar karena ada bermacam-macam sasaran, antara lain operative goal dan sasaran resmi. Juga bermacam-macam output yang dihasilkan.

d. Pendekatan Gabungan

Pendekatan kontingensi mengadakan pengukuran efektivitas secara menyeluruh, yaitu :

- 1) Oleh kelompok birokrat organisasi
- 2) Oleh kelompok karyawan
- 3) Oleh kelompok saham
- 4) Oleh kelompok bahan dan peralatan
- 5) Oleh kelompok pemilik atau owner

Menurut Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan sasaran program

Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2. Sosialisasi program

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3. Pencapaian Tujuan program

Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Pemantuan program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Sedangkan Menurut Duncan dalam Mustafa (2015:35) mengenai ukuran efektivitas sebagai berikut :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit.

2. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

### **2.2.2 Konsep Kesejahteraan**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (1): “Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini mewujudkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara



layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Pelaksanaan pelimpahan kewenangan pemerintah kepada pemerintah daerah seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang pada prinsipnya memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengembangkan potensi atas prakarsa masyarakat di daerah guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Kesejahteraan adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisir dan memiliki tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya juga tercakup pula unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dalam berbagai kehidupan masyarakat seperti pendapatan, jaminan social, kesehatan, perumahan, Pendidikan, rekreasi budaya, dan lain sebagainya (Huda, 2009:73).

Hal yang paling penting dari kesejahteraan adalah pendapatan, sebab beberapa aspek dari kesejahteraan rumah tangga tergantung pada tingkat pendapatan. Pemenuhan kebutuhan dibatasi oleh pendapatan rumah tangga yang dimiliki, terutama bagi yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga dapat merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera (Susi, 2019:25).

Kesejahteraan merupakan usaha untuk memperjuangkan harkat kemanusiaan yang menempatkan manusia secara terhormat sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, kecukupan sandang, pangan, papan, kesehatan, keamanan, persaudaraan dan yang lainnya. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dimulai dari unit terkecil yaitu dari keluarga merupakan tahap awal seseorang untuk bersosialisasi. Setiap masyarakat mempunyai system sosial terkecil yaitu keluarga (Huda, 2009:218).

Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi semua kebutuhan: fisik materil, mental spiritual dan sosial yang memungkinkan keluarga keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak tumbuh dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas (Sururi, 2015:6).

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi suatu masyarakat bahwa telah berada pada kondisi sejahtera. Kesejahteraan tersebut dapat diukur dari kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat, Pandangan masyarakat umum, dalam keluarga yang sejahtera maka mampu menyekolahkan anggota keluarganya hingga setinggi mungkin. Sama halnya jika semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan membawa keluarganya semakin sejahtera karena mendapatkan timbal balik seperti pekerjaan yang mapan dan pendapatan yang mencukupi. Kesejahteraan merupakan tujuan dari seluruh keluarga. Kesejahteraan diartikan sebagai kemampuan keluarga untuk memenuhi semua kebutuhan untuk bisa hidup layak, sehat, dan produktif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, masih terdapat sekitar 28 juta orang atau 10,8%

penduduk yang tinggal di bawah garis kemiskinan atau mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan pokoknya (Rizki, 2020:1).

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok guna untuk memenuhi standar hidup yang layak sehingga mereka mampu mengembangkan kemampuan selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Dari penjelasan tersebut kesejahteraan sosial selalu dikaitkan dengan kualitas hidup. Untuk mencapai kualitas hidup yang ideal maka diperlukan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial yang memerlukan upaya perlindungan dan pelayanan sosial yang bersifat terus-menerus guna untuk melindungi dan mengembalikan kehidupan keluarga, membantu individu-individu mengatasi masalah-masalah yang berasal dari luar maupun dari diri sendiri. Dari upaya peningkatan kesejahteraan maka tidak serta merta membuat seseorang yang masih miskin menjadi tidak miskin lagi. Peningkatan kesejahteraan ini merupakan suatu indicator adanya pergerakan kualitas hidup masyarakat demi kehidupan yang lebih baik lagi daripada kehidupan yang sebelumnya, meskipun masih dalam kondisi dibawah garis kemiskinan (Sulistyo, 2018:20).

Menurut (Suharto, 2014:53) kesejahteraan sosial pada intinya mencakup tiga konsepsi yaitu :

1. Kondisi kehidupan atau keadaan kesejahteraan, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial
2. Institusi, arena atau bidang kegiatan yang melibatkan Lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial
3. Aktivitas, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha yang terorganisasi untuk mencapai kondisi sejahtera.

Secara umum, kesejahteraan sosial sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama) yaitu suatu keadaan yang terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, Pendidikan dan perawatan kesehatan (Edi, 2014:33). Menurut (Asriyah, 2007:45), Kesejahteraan terdiri dari dua macam diantaranya:

1. Kesejahteraan perorangan

Kesejahteraan perorangan sinonim dengan tingkat terpenuhinya kebutuhan dari warga bersangkutan, sepanjang terpenuhinya kebutuhan ini tergantung dari faktor-faktor ekonomis, oleh karena itu kesejahteraan perorangan selalu merupakan saldo dari "*utilities*" yang positif dan negative dalam "*utilities*" yang positif termasuk kenikmatan yang diperoleh sang warga dari semua barang langka pada dasarnya dapat memenuhi kebutuhan manusiawi. Dalam "*utilities*" negatif termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk memperoleh barang itu (seperti terbuang waktu senggang) dampak negatif dari perbuatan-perbuatan warga lain

(seperti dampak negatif terhadap lingkungan) dimana kesejahteraan perorangan terbatas hanya pada kesejahteraan itu sendiri.

## 2. Kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan yang menyangkut kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat, dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan masyarakat dari beberapa individu atau kesejahteraan Bersama. Adapun yang harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan diantaranya:

- a. Adanya persediaan sumber-sumber pemecahan masalah yang dapat digunakan. Dalam hal ini memang harus diperhatikan guna penyelesaian permasalahan yang ada khususnya dalam hal meningkatkan kesejahteraan karena tanpa adanya sumber penyelesaian masalah maka masalah tersebut akan tetap ada.
- b. Pelaksanaan usaha dalam menggunakan sumber-sumber pemecahan masalah harus efisien dan tepat guna. Pada tahap ini kita harus dapat menyesuaikan antara masalah dengan sumber pemecahan masalah yang tepat dan diselesaikan dengan cepat.
- c. Pelaksanaan usaha meningkatkan kesejahteraan harus bersifat demokratis. Dalam hal ini meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat lebih baik masyarakat tersebut dilibatkan didalamnya.
- d. Mencegah adanya dampak buruk dari usaha tersebut hal ini juga harus diperhatikan dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebaiknya dalam

melakukan usaha tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, tetapi dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sehingga mampu menimbulkan dampak positif bagi masyarakat.

#### **2.2.2.1 Indikator Kesejahteraan**

Kesejahteraan adalah sesuatu yang bersifat obyektif , sehingga ukuran kesejahteraan bagi setiap individu berbeda atau keluarga berbeda satu sama lain. Tetapi pada prinsipnya kesejahteraan berkaitan erat dengan kebutuhan dasar. Apabila kebutuhan dasar terpenuhi, maka dikatakan bahwa tingkat kesejahteraan individu tau keluarga tersebut dapat terpenuhi. Sedangkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, maka dikatakan bahwa individu atau keluarga tersebut berada di bawah kemiskinan (Natalia, 2016:9).

Menurut (Sukmawati, 2018:7) Tahapan dan indikator Keluarga sejahtera adalah sebagai berikut :

1. Tahapan
  - a. Tahapan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 (enam) indikator Keluarga Sejahtera I (KSI) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga”(*basic needs*). tahapan Keluarga Sejahtera I.
  - b. Tahapan Keluarga Sejahtera I yaitu yaitu keluarga mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 8 (delapan) indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator “kebutuhan psikologis” (*psychological needs*) keluarga.
  - c. Tahapan Keluarga Sejahtera II Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I dan 8 (delapan) indikator KS II, tetapi tidak

memenuhi salah satu dari 5 (lima) indikator Keluarga Sejahtera III (KS III), atau indikator “kebutuhan pengembangan”(developmental needs) dari keluarga.

- d. Tahapan Keluarga Sejahtera III Yaitu keluarga yang mampu memenuhi 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, dan 5 (lima) indikator KS III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari 2 (dua) indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” (*self esteem*) keluarga.
- e. Tahapan Keluarga Sejahtera III Plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari 6 (enam) indikator tahapan KS I, 8 (delapan) indikator KS II, 5 (lima) indikator KS III, serta 2 (dua) indikator tahapan KS III Plus.

## 2. Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera

- a. Enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator “kebutuhan dasar keluarga” dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu :
  - 1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
  - 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian
  - 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai lantai dan dinding yang baik
  - 4) Bila anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan
  - 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
  - 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah

b. Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator “kebutuhan psikologis” keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu :

- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing
- 2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur. Indikator ini tidak berlaku untuk anggota keluarga vegetarian. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun
- 3) Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah
- 4) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing
- 5) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan
- 6) Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bias baca tulisan latin, indikator ini tidak berlaku bagi keluarga yang tidak mempunyai anggota keluarga berumur 10-60 tahun
- 7) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi

c. Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator “kebutuhan pengembangan”, dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu:

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. Pengertian keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama ialah upaya



keluarga untuk meningkatkan pengetahuan agama mereka masing-masing.

- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang.
  - 3) Kebiasaan keluarga makan Bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
  - 4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
  - 5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/tv/ internet
- d. Dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator “aktualisasi diri” dari 21 indikator keluarga, yaitu:
- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial
  - 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/Yayasan/institusi masyarakat

#### **2.2.2.2 Tujuan Kesejahteraan Masyarakat**

Menurut (Fahrudin, 2012:12) kesejahteraan Masyarakat mempunyai tujuan antara lain :

- 1) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- 2) Untuk mencapai kesesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan. Tiga tujuan utama dari

system kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu :

a) Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan dan menjaga keseimbangan atau kelangsungan keadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, termaksud hal-hal yang berkaitan dengan definisi makna dan tujuan hidup, motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dalam perorangan, kelompok ataupun masyarakat. Kegiatan sistem kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi kegiatan yang diadakan untuk sosialisasi terhadap norma-norma yang dapat diterima, peningkatan pengetahuan dan kemampuan untuk mempergunakan sumber-sumber dan kesempatan yang tersedia dalam masyarakat melalui pemberian informasi, nasihat dan bimbingan, seperti fasilitas Pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya.

b) Pengawasan Sistem

Melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial. Kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial untuk mencapai tujuan semacam itu meliputi fungsi-fungsi pemeliharaan berupa kompensasi, sosialisasi, peningkatan kemampuan menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada bagi golongan masyarakat yang memperlihatkan penyimpangan tingkah laku.

#### c) Perubahan Sistem

Mengadakan perubahan kearah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan itu, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrument untuk menyisihkan hambatan-hambatan terhadap partisipasi sepenuhnya dan adil bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan, pembagian sumber-sumber secara lebih pantas dan adil, dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara adil pula.

#### **2.2.2.3 Fungsi Kesejahteraan Masyarakat**

Fungsi-fungsi kesejahteraan masyarakat bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan sosial-ekonomi, menghidarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fahrudin, 2012:12). Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial masyarakat tersebut antara lain:

- 1) Fungsi pencegahan (*preventive*), Kesejahteraan sosial masyarakat ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan -kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta Lembaga-lembaga sosial baru.
- 2) Fungsi penyembuhan (*curative*), Kesejahteraan sosial ditujukan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial

agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.

- 3) Fungsi pengembangan (*development*), Kesejahteraan sosial masyarakat berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
- 4) Fungsi penunjang (*supportive*), Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sector atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

#### **2.2.2.4 Penyelenggaraan Kesejahteraan**

Menurut (Notowidagdo, 2016:110-115) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat dilaksanakan dengan beberapa program, yaitu:

- 1) Rehabilitasi sosial
  - a. Rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosialnya secara wajar.
  - b. Upaya rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk motivasi, dan diagnosis psikososial, perawatan dan pengasuhan, pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bantuan dan asistensi sosial, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut atau rujukan.
- 2) Jaminan sosial

- a. Jaminan sosial dalam bentuk asuransi untuk menjamin fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial dan ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- b. Jaminan dalam bentuk tunjangan untuk menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

### 3) Pemberdayaan sosial

- a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Pemberdayaan ini dilakukan dalam bentuk diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulant modal usaha, dan lain sebagainya.
- b. Meningkatkan peran serta individu, Lembaga, dan sumber daya dalam penyelenggaraan sosial yang dilakukan dalam bentuk penguatan kelembagaan masyarakat, kemitraan, dan penggalangan dana serta pemberian stimulant. Pemberdayaan tersebut dilakukan melalui peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi sumber daya, penggalan nilai-nilai dasar, pemberian akses, dan bantuan usaha.

### 4) Perlindungan sosial

Perlindungan sosial dilakukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar

minimal. Perlindungan sosial tersebut dilaksanakan melalui bantuan sosial dan bantuan hukum.

### **2.2.3 Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat menurut (Sumodiningrat, 2009: 60) merupakan upaya pemerintah mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat miskin menuju masyarakat yang sejahtera. Selanjutnya, (Suharto 2005: 60) mengemukakan bahwa tujuan pemberdayaan yaitu menunjuk pada keadaan atau hal yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

#### **1. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program Pembangunan**

Efektivitas organisasi dalam pelaksanaan program pembangunan ditentukan oleh adanya faktor pendukung. (Kunarjo, 2002:126) menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan tentang pelaksanaan program pembangunan memerlukan adanya factor yang mendukung terselenggaranya suatu program kegiatan yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran dengan mengaktifkan secara efektif faktor pendukung berupa : a) Peranan pendamping, b) Partisipasi masyarakat, c) Kemampuan kelompok sasaran.

a. Peranan pendamping

Peranan pendamping dalam pengembangan kelompok sasaran antara lain (1) membantu kelompok sasaran untuk memperkuat dinamika intern dengan memantapkan aspek keorganisasian (2) Membantu mengidentifikasi berbagai kemungkinan atau potensi lingkungan terdekat yang dapat dikelola sebagai usaha produktif (3) Sebagai penghubung antara kelompok sasaran dengan berbagai potensi yang termanfaatkan dari luar (Kunarjo, 2002:126).

b. Partisipasi masyarakat

Partisipasi sudah menjadi bahasa yang umum dan sangat dikenal sejakdulu, partisipasi tiba-tiba menjadi sesuatu yang harus didorong. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja karena dana pemerintah terbatas jika dibandingkan dengan keinginan membangun.

Bentuk (tahap) partisipasi yang dikemukakan oleh (Ndraha 2000: 26), sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai salah satu titik awal perubahan sosial.
- 2) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi,
- 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan,
- 4) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan.
- 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan,
- 6) Partisipasi dalam menilai pembangunan.

### c. Kemampuan kelompok sasaran

Menurut (Dunn 2002: 162) “Kelompok sasaran (target group) adalah orang, masyarakat atau organisasi yang kepada mereka suatu kebijakan atau program diharapkan memberikan akibat”. Masyarakat selaku kelompok sasaran diharapkan, menjadi pihak yang menikmati hasil suatu program, harus ditentukan secara jelas mobilitasi sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat.

## 2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Pembangunan

Program pembangunan lahir dari adanya suatu kebijakan. Jadi berbicara mengenai program tentu akan membicarakan mengenai kebijakan yang mendasari lahirnya program tersebut. Peters dalam (Lestanata, 2016:12) mengemukakan bahwa “Penyebab kegagalan implementasi kebijakan meliputi: 1) Kurangnya informasi, 2) Isi (tujuan) kebijakan tidak jelas, 3) Pelaksanaannya tidak memperoleh dukungan yang cukup, 4) Pembagian tugas dan wewenang yang tidak jelas”. Sejalan dengan itu Bardach dalam (Lestanata, 2016:12) menyatakan bahwa “Kegagalan implementasi kebijakan disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, struktur organisasi yang kurang memadai, dan komitmen yang rendah dari pelaksana.”

### 2.2.4 Konsep Gotong Royong

Masyarakat mengembangkan mekanisme sosial dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah sosial. Gotong royong merupakan sikap positif yang mendukung dalam perkembangan dan juga perlu dipertahankan sebagai suatu perwujudan kebiasaan melakukan sesuatu pekerjaan secara Bersama-sama. Nilai tolong menolong dan gotong



royong ini sesuai dengan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menjiwai setiap kegiatan pembangunan (Edi, 2006:16).

Gotong royong sebagai suatu ciri khas masyarakat yang tidak terlepas dari eksistensi masyarakatnya sebagai individu maupun makhluk sosial. Sebab manusia sesuai dengan kualitasnya mampu membangun dirinya yaitu manusia yang mengetahui serta sadar dan memiliki kesadaran akan kebutuhannya. Konsep gotong royong yang kita nilai tinggi itu merupakan suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan masyarakat Indonesia. Di berbagai wilayah telah ada praktek dari gotong royong hanya saja dengan nama dan istilah yang berbeda (Widjaja, 2004:76).

Gotong royong merupakan bagian dari etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan (Tap MPR NO. VI/MPR/2001). Etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling menolong, saling mencintai diantara sesama manusia dan sesama warga negara. Etika ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kembali kehidupan berbangsa yang berbudaya tinggi dengan menghargai dan mengembangkan budaya nasional yang bersumber dari budaya daerah (termasuk didalamnya ialah gotong royong) agar mampu melaksanakan adaptasi, interaksi dengan bangsa lain dengan tindakan proaktif sejalan dengan tuntutan globalisasi. Gotong royong merupakan perilaku sosial dalam suatu kelompok atau komunitas, yang dilandasi oleh nilai sosial budaya, seperti solidaritas, kebersamaan, suka rela, dan kerukunan. Berdasar pengertian itu maka gotong royong meliputi nilai, jaringan sosial dan perilaku sosial.

Konsep gotong royong juga dapat dimaknai dalam konteks pemberdayaan masyarakat karena bisa menjadi modal sosial untuk membentuk kekuatan kelembagaan di tingkat komunitas, masyarakat negara serta masyarakat lintas bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan. Hal tersebut juga dikarenakan di dalam gotong royong terkandung makna *collective to struggle, self governing, common goal*, dan *sovereignty*. Dalam perspektif sosio budaya, nilai gotong royong adalah semangat yang diwujudkan dalam bentuk perilaku atau tindakan individu yang dilakukan tanpa pamrih untuk melakukan sesuatu secara Bersama-sama demi kepentingan Bersama atau individu tertentu (Pranadji, 2009:62).

#### **2.2.5 Konsep Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR)**

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 pasal 1 ayat 5 dan 6, pada dasarnya pemberdayaan (*empowerment*) adalah proses perbaikan pola pikir (*kognitive*), sikap mental (*affective*) dan pola tindak (*psicomotoric*) sumberdaya manusia atau masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok, dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan guna peningkatan kesejahteraan sosial ekonominya. Sedangkan gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat, baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (disingkat PDPGR) adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu tata nilai

dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan partisipasi, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat secara efisien, efektif dan produktif dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan (Peraturan Bupati Nomor 19 pasal 1 ayat 1 tentang Petunjuk Pelaksanaan PDPGR). Selain itu, Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong merupakan aksi daerah dalam mewujudkan agenda Nawacita dan Trisakti yang disinergikan sebagai gerakan kerja aparaturnya dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

Adapun tujuan dari Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini menurut Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 pasal 3 tentang Petunjuk Pelaksanaan PDPGR bahwa tujuan dari program ini adalah :

- a) Merivitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kesukarelaan, kebersamaan dan tolong menolong dengan semangat kerja ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna.
- b) Mengoptimalkan gotong royong sebagai sarana revolusi mental masyarakat dan aparaturnya dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
- c) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menata dan memelihara lingkungan fisik dan sosial budaya guna terjadinya solidaritas dan kebersamaan sosial.
- d) Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan program atau kegiatan sosial ekonomi produktif guna peningkatan kapasitas kegiatan dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

- e) Melaksanakan program atau kegiatan pembangunan yang dapat memberikan kesempatan kerja dan produktivitas kegiatan guna peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi wilayah.
- f) Mempererat semangat kebersamaan, solidaritas dan tolong menolong dalam mencapai hasil pembangunan serta memperkuat jiwa nasionalisme dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong dalam Bab IV pasal 6 bahwa dalam program PDPGR ini ada agen-agen yang membantu pemerintah daerah dalam membina masyarakat dan membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan program ini. Selain itu, dalam program PDPGR ini dibentuk sebuah pengorganisasian, yang dimana organisasi-organisasi ini sebagai penyelenggara PDPGR, yaitu :

#### **2.2.5.1 Tim Pengarah PDPGR**

Tim Pengarah PDPGR adalah tim yang bertugas dan berwenang memberikan arahan perencanaan, pelaksanaan, penegndalian, dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan PDPGR. Dalam tim pengarah PDPGR ini terdiri atas; Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar, Komandan Kodim 1607/ Sumbawa dan Kapolres Sumbawa Barat. Tim pengarah yang dibentuk untuk program PDPGR ini ditetapkan dengan Keptusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2016 tentang PDPGR).

Selain itu hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 19 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong pada bagian ke VI menyebutkan fungsi atau peranan dari tim pengarah Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) yaitu sebagai berikut :

1. Merumuskan kebijakan dan langkah-langkah pemberdayaan gotong royong sebagai suatu tata nilai budaya (secara cultural) dan suatu sistem aksi program (secara structural) dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.
2. Memberikan arahan terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penegndalian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan gotong royong kepada Stakeholders PDPGR di tingkat Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Melakukan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat.
4. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Pusat, serta Lembaga/Pihak lainnya untuk pelaksanaan dan keberhasilan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Menerima rencana kegiatan gotong royong stimulan dan/atau gotong royong padat karya yang telah direkomendasikan oleh Kepala SKPD yang disampaikan melalui Tim Penanggung Jawab Program PDPGR, yaitu sebelum pengajuan

Perubahan APBD tahun berkenaan atau sebelum pengajuan APBD tahun berikutnya.

6. Tim Pengarah (khususnya Bupati dan Pimpinan DPRD) melalui TAPD dan Badan Anggaran DPRD menyetujui/menetapkan kegiatan gotong royong stimulan dan/atau gotong royong padat karya sebagai kegiatan PDPGR dalam PERDA Perubahan APBD tahun berkenaan atau PERDA APBD tahun berikutnya.
7. Tim Pengarah (Bupati) menetapkan nama/kelompok agen pemberdayaan PDPGR yang berfungsi untuk memfasilitasi kegiatan gotong royong padat karya dengan sumber pembiayaan dan perusahaan (dana CSR) sesuai dengan lokasi kegiatan gotong royong.

#### **2.2.5.2 Tim Pembina PDPGR**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong pasal 8, menjelaskan bahwa tim pembina PDPGR adalah tim yang berwenang dan berfungsi melakukan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan PDPGR di Kecamatan. Dalam tim pembina ini terdiri atas; Camat, Kapolsek, Koramil dan anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

Menurut Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong bagian VI menjelaskan fungsi / peranan tim pembina PDPGR sebagai berikut :

1. Melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan gotong royong ditingkat Kecamatan.
2. Membantu tim pengarah dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
3. Menerima berita acara hasil musyawarah agen pemberdayaan dengan subyek/obyek PDPGR tentang usulan rencana kegiatan gotong royong stimulan dan/atau gotong royong padat karya yang bersumber dananya dari Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya usulan rencana kegiatan diteruskan kepada tim penanggung jawab program PDPGR, yaitu bulan Februari-April untuk perubahan APBD tahun berkenaan atau bulan Juli-Agustus untuk APBD tahun berikutnya.
4. Camat (sebagai anggota tim pembina) mengetahui/memberikan persetujuan terhadap penyaluran biaya kegiatan gotong royong dari agen pemberdayaan kepada subyek/obyek PDPGR pada lingkup kecamatan, yaitu setelah persiapan pelaksanaan Peraturan daerah perubahan APBD tahun berkenaan atau setelah persiapan pelaksanaan PERDA APBD tahun berikutnya.
5. Membuat laporan secara berkala setiap tiga bulan dan setahun kepada tim pengarah (Bupati Sumbawa Barat) tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tim pembina PDPGR.

### **2.2.5.3 Tim Penggerak PDPGR**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 pasal 9 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong menjelaskan bahwa tim penggerak adalah tim yang berwenang dan berfungsi menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan serta evaluasi dan pelaporan PDPGR di desa/ kelurahan. Dalam tim penggerak PDPGR ini terdiri atas; Kepala Desa/ Lurah, Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Tim penggerak ini pula sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.

Sedangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong bagian ke VI tentang kelembagaan PDPGR menjelaskan beberapa fungsi/peranan dari anggota tim penggerak Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR), yaitu :

1. Menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penegndalian, serta evaluasi dan pelaporan kegiatan gotng royong di tingkat desa/kelurahan.
2. Membantu tim pengarah dan tim pembina dalam melakukan sosialisasi Peratran Daerah dan Peraturan Bupati tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) kepada masyarakat subyek/obyek PDPGR di tingkat desa/kelurahan.
3. Melakukan rapat koordinasi bulanan untuk member persetujuan terhadap usulan rencana kegiata gotong royong yang diajukan oleh agen pemberdayaan bersama dengan subey/obyek PDPGR ditingkat desa/kelurahan.



4. Kepala Desa/Lurah (sebagai anggota tim penggerak) mengetahui/memberikan persetujuan terhadap penyaluran biaya kegiatan dari agen pemberdayaan kepada subyek/obyek PDPGR pada lingkup desa/kelurahan dan Peliuk, yaitu setelah persiapan pelaksanaan PERDA perubahan APBD tahun berkenaan atau setelah persiapan pelaksanaan PERDA APBD tahun berikutnya.
5. Kepala Desa/Lurah beserta perangkatnya (sebagai penanggung jawab pembangunan diwilayah) dapat memberikan pendampingan dan/atau melaksanakan kegiatan gotong royong bersama-sama dengan agen pemberayaan dan subyek/obyek PDPGR.
6. Membuat laporan proses dan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi/peranannya secara berkala setiap tiga bulan dan setahun kepada tim pengarah (Bupati Sumbawwa Barat) melalui tim penanggung jawab program PDPGR.

#### **2.2.5.4 Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR**

Menurut Peraturan Bupati Nomr 19 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong bagian VI menjelaskan bawah tim ini merupakan perangkat pemberdayaan gotong royong yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan program/kegiatan gotong royong yang. Adapun fungsi/peranan tim ini yaitu :

1. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan gotong royong stimulan dan/atau kegiatan gotong royong padat karya.
2. Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan gotong royong mandiri oleh subyek/obyek PDPGR secara regular setiap tiga bulan

(Maret, Juni, September dan Desember), untuk selanjutnya menentukan subyek/obyek PDPGR yang berpartisipasi /juara sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan perbankan dalam rangka membantu memperlancar penyaluran biaya kegiatan gotong royong kepada agen pemberdayaan PDPGR dan subyek/obyek PDPGR.
4. Melakukan rapat kooordiansi bulanan untuk membahas permasalahan dan membahas hambatan dalam pelaksanaan kegiatan PDPGR guna dicari solusinya.
5. Membuat laporan pelaksanaan tupoksinya secara sukarela setiap tiga bulan setahun kepada tim pengarah (Bupati Sumbawa Barat) melalui tim penanggung jawab program PDPGR.

#### **2.2.5.5 Agen Pemberdayaan PDPGR**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 pasal 10 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong menjelaskan bahwa agen pemberdayaan adalah satuan penyelenggara yang berasal dari masyarakat yang berwenang serta pelaksanaan dan memfasilitasi perencanaan serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan gotong royong padat karya bersama dengan masyarakat. Agen – agen pemberdayaan ini juga terdiri atas :

1. Agen pemberdayaan PDPGR Kecamatan yang terdiri atas paling banyak 10 orang anggota.
2. Agen pemberdayaan PDPGR Desa/Kelurahanyang terdiri atas paling banyak 6 orang.

3. Agen pemberdayaan PDPGR Peliuk terdiri atas 3 orang.

Selain itu, dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong pasal 11 dan 12 menjelaskan bahwa, agen- agen yang dibentuk dalam Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong ini tentunya memiliki tugas serta berwenang untuk memfasilitasi dan menggerakkan program tersebut seperti salah satu bagian dari program ini yaitu gotong royong mandiri, menyelenggarakan gotong royong stimulant dan gotong royong padat karya yang dananya bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ) dan atau APB Desa serta dana CSR dan atau sumber lainnya yang sah. Selain itu, agen pemberdayaan PDPGR ini bertugas:

1. Melakukan pendataan kelompok sasaran
2. Mengidentifikasi serta mengelompokkan permasalahan dan daftar rencana kebutuhan warga atau kelompok sasaran.
3. Menghimpun dan mendokumentasikan data permasalahan dan daftar rencana kebutuhan warga atau kelompok sasaran untuk diintegrasikan menjadi bank data PDPGR.
4. Memfasilitasi pengusulan rencana tindak lanjut kebutuhan kelompok sasaran kepada Bupati.
5. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan gotong royong, monitoring, evaluasi, serta membuat pelaporan dan penatausahaan kegiatan.
6. Mengendalikan pengelolaan dana stimulan ekonomi produktif.

## **2.3 Kerangka Berpikir**

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program. Efektivitas organisasi dalam pelaksanaan program pembangunan ditentukan oleh adanya faktor pendukung. (Kunarjo, 2002:126) menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan tentang pelaksanaan program pembangunan memerlukan adanya faktor yang mendukung terselenggaranya suatu program kegiatan yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran dengan mengaktifkan secara efektif faktor pendukung berupa :1) Peranan pendamping, 2) Partisipasi masyarakat, 3) Kemampuan kelompok sasaran.

Menurut Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :

1) Ketepatan Sasaran Program

Yaitu sejauh mana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya.

2) Sosialisasi Program

Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.

3) Pencapaian Tujuan Program

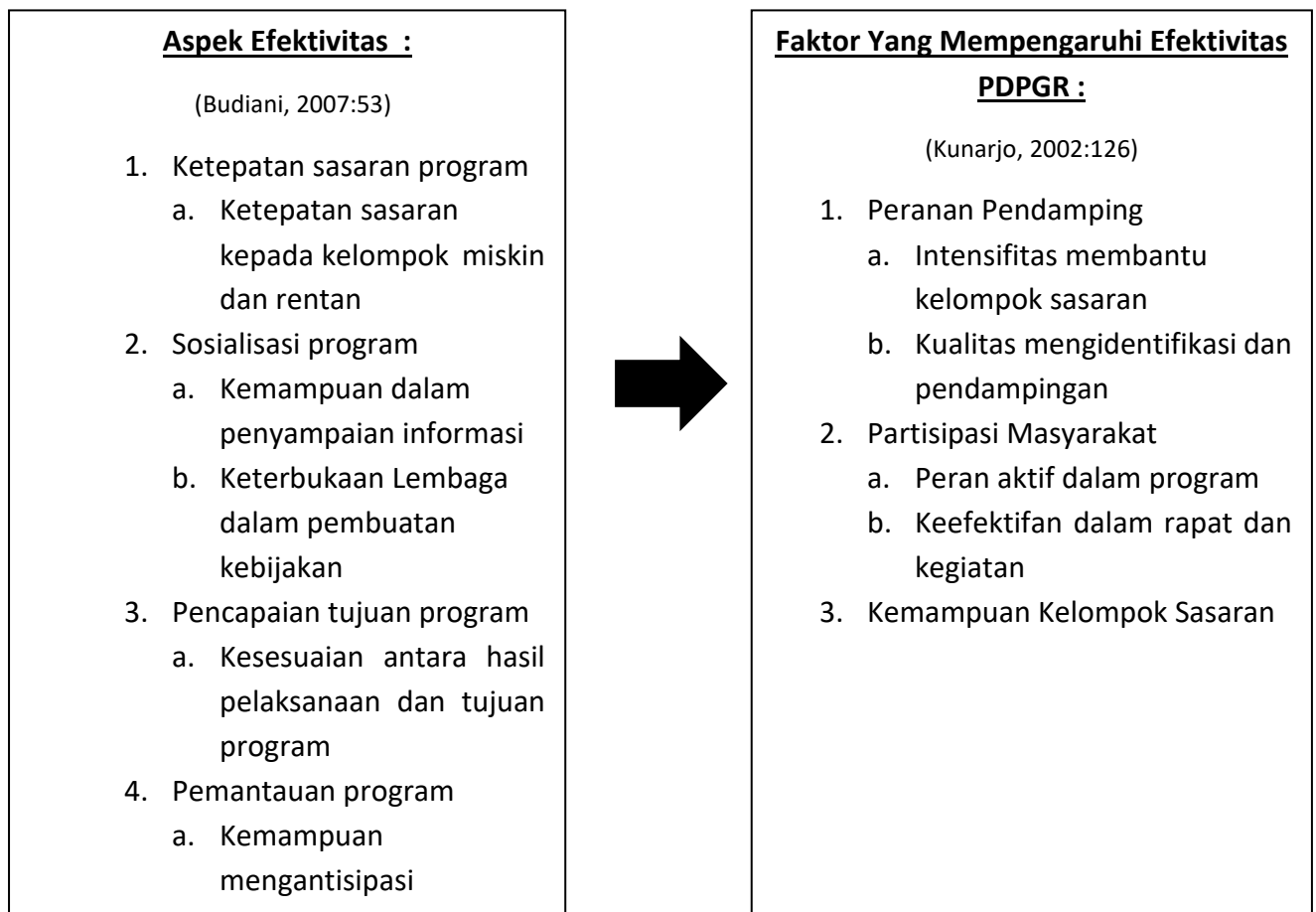
Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Pemantuan Program

Yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

Gambar 2.3

### Kerangka Berpikir Peneliti



## 2.4 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasaan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya di lapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang

masih berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

Dengan demikian untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang digunakan dalam penelitian ini serta sesuai dengan isi dari kerangka teori peneliti. Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini, antara lain :

a. Efektivitas

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan maupun program. Efektivitas organisasi dalam pelaksanaan program pembangunan ditentukan oleh adanya faktor pendukung. (Kunarjo, 2002:126) menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan tentang pelaksanaan program pembangunan memerlukan adanya faktor yang mendukung terselenggaranya suatu program kegiatan yang bermutu, tepat waktu dan tepat sasaran dengan mengaktifkan secara efektif faktor pendukung berupa: 1) Peranan pendamping, 2) Partisipasi masyarakat, 3) Kemampuan kelompok sasaran. Menurut Budiani (2007:53) menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel antara lain Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Pencapaian Tujuan program, Pemantuan program.

b. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (disingkat PDPGR) adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu tata nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat ikhlas, jujur dan sungguh-sungguh untuk mewujudkan partisipasi, pemberdayaan dan perluasan kesempatan kerja masyarakat secara efisien, efektif dan produktif dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan (Peraturan Bupati Nomor 19 pasal 1 ayat 1 tentang Petunjuk Pelaksanaan PDPGR). Selain itu, Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong merupakan aksi daerah dalam mewujudkan agenda Nawacita dan Trisakti yang disinergikan sebagai gerakan kerja aparaturnya dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat.

## **2.5 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur atau dapat melihat definisi operasional suatu penelitian maka seorang peneliti akan dapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang berdasarkan pada kerangka berpikir peneliti, yaitu :

#### **A. Aspek – aspek Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong**

1. Ketepatan sasaran program
  - a. Ketepatan sasaran kepada kelompok miskin dan rentan
2. Sosialisasi program
  - a. Kemampuan dalam penyampaian informasi
  - b. Keterbukaan Lembaga dalam pembuatan kebijakan
3. Pencapaian Tujuan program
  - a. Kesesuaian hasil pelaksanaan program dengan tujuan program
4. Pemantuan program
  - a. Kemampuan dalam mengantisipasi permasalahan program

#### **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong**

1. Peranan pendamping
  - a. Intensifitas membantu kelompok sasaran
  - b. Kualitas mengidentifikasi dan pendampingan
2. Partisipasi masyarakat
  - a. Peran aktif dalam program
  - b. Keefektifan dalam rapat dan kegiatan
3. Kemampuan kelompok sasaran



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Moleong, 2011:6) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pada metode penelitian deskriptif menurut (Moleong, 2011:11) data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Laporan-laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikangambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.

Karena Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus maka hasil penelitian ini bersifat analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan bagaimana Efektivitas Keberlangsungan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat .

### **3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Lokasi atau obyek dalam penelitian ini berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD Sumbawa Barat dan Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di DPMDM bahwa dinas tersebut yang dilibatkan oleh pemerintah daerah sejak awal pelaksanaan PDPGR yaitu tahun 2016, sedangkan lokasi kedua di Desa Seloto, karena desa ini merupakan salah satu desa terpencil dan jauh dari jangkauan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang ada di Kecamatan Taliwang. Pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang kaya dengan data-data penunjang untuk penelitian ini sehingga dapat membantu permasalahan yang ada di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, waktu yang dibutuhkan oleh peneliti diperkirakan sekitar 2 Minggu (14 hari). Waktu dihitung sejak dikeluarkannya surat permohonan izin penelitian oleh pihak kampus. Ini dirasa cukup untuk menyelesaikan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, oleh karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati dan meneliti Efektivitas Keberlangsungan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dan mengamati faktor apa saja yang mempengaruhi Efektivitas Keberlangsungan

Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan data tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

#### **3.4.1 Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian atau implemntasi Program PDPGR. Metode yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian. Karena mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian, peneliti tidak mungkin mengadakan wawancara dengan seluruh masyarakat Desa Seloto Kecamatan Taliwang, maka penyusun mengambil strategi untuk mewawancarai Kepala Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Pemerintahan Desa, Kepala Desa Seloto, Agen PDPGR, serta masyarakat yang mendapat bantuan PDPGR.

#### **3.4.2 Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip Pemerintah Desa, Daftar nama penerima bantuan PDPGR, catatan peneliti dilapangan, foto-foto kegiatan PDPGR serta foto wawancara

dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.

### **3.5 Teknik Penentuan Informan**

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan tehnik *Purposive Sampling*, dimana penelitian dilakukan dengan krtiretia yang sudah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Menurut (Hamid, 2013:12) Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai subyek peneliti. Adapun subyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
2. Kepala Desa Seloto Kecamatan Taliwang
3. Agen-agen PDPGR di Desa Seloto Kecamatan Taliwang
4. Masyarakat penerima Bantuan Program PDPGR (sasaran)

### **3.6 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode agar diperoleh data yang lengkap. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

### **3.6.1 Observasi**

Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan indera tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. observasi atau pengamatan merupakan salah satu Teknik penelitian yang sangat penting. Pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan. Ternyata ada beberapa tipologi pengamatan. Terlepas dari jenis pengamatan, dapat dikatakan bahwa pengamatan terbatas atau tergantung pada jenis variasi pendekatan (Moleong, 2009: 242). Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis mengenai bagaimana Efektivitas Keberlangsungan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.

### **3.6.2 Wawancara/Interview**

Menurut (Moleong, 2010:187) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan petunjuk umum. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan (semi struktur). Penggunaan Teknik wawancara dengan menggunakan petunjuk umum wawancara dikarenakan agar garis besar hal-hal yang akan ditanyakan kepada narasumber terkait dengan Efektivitas Keberlangsungan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong

Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Wawancara dilakukan dengan membawa pedoman wawancara (*interview guide*) dengan tujuan agar wawancara tidak menyimpang dari permasalahan.

### **3.6.2 Metode Dokumentasi**

Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dan telaah pustaka, dimana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa literatur, laporan tahunan, majalah, jurnal, table, karya tulis ilmiah dokumen peraturan pemerintah dan Undang-undang yang telah tersedia pada Lembaga yang terkait dipelajari, dikaji dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/ struktur klasifikasi. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil wawancara. Reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan, berikut ini adalah Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:

### **3.7.1 Reduksi data**

Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung secara terus menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung atau selama pengumpulan data.

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

### **3.7.2 Triangulasi**

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan Teknik triangulasi sebagai Teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330). Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan Teknik yang berbeda (Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi ini selain untuk mengecek kebenaran data juga dapat berguna untuk memperkaya data.

### **3.7.3 Menarik kesimpulan**

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan yang mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.